

## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI I DPR RI

**KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)**

---

Rapat ke : 24 (dua puluh empat)  
Tahun Sidang : 2018-2019  
Masa Persidangan : I  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekuatan Pertahanan (Kuathan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) Mabes TNI, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Direktur Utama (Dirut) PT. ASABRI (Persero), dan Dirut BPJS Kesehatan.

Hari, Tanggal : Selasa, 16 Oktober 2018  
Pukul : 12.00 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : 1. Dibuka oleh Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung, S.I.P., Wakil Ketua Komisi I DPR RI  
2. Dilanjutkan dan ditutup oleh, Ir. H. Satya Widya Yudha, M.E., M.Sc., Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P. M.Si., Kabag Set. Komisi I DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Acara : Penyampaian laporan hasil penyusunan Pedoman Kerja (PK) Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kementerian Pertahanan RI dan BPJS serta perkembangan pelayanan kesehatan bagi Anggota TNI dan keluarga (tindak lanjut kesimpulan RDP Komisi I DPR RI dengan Dirjen Kuathan Kemhan RI, Sekjen Kemenkes, Dirut PT. ASABRI, dan Dirut BPJS Kesehatan tanggal 20 Maret 2018).

Hadir : 1. ... orang dari 54 Anggota Komisi I DPR RI  
2. a. Dirjen Kuathan Kemhan R.I., Mayjen TNI Bambang Hartawan, M.Sc;  
b. Kapuskes Mabes TNI, Mayjen TNI Ben Yura Rimba;

- c. Sekjen Kemenkes diwakili oleh Sahli Bidang Ekonomi Kesehatan, dr. H.M. Subuh;
- d. Dirut ASABRI, Letjen TNI (Purn) Sonny Widjaja;
- e. Dirut BPJS Kesehatan diwakili oleh :
  - 1). Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, dr. Maya Amiarny Rusady;
  - 2). Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga, Dr. dr. H Bayu Wahyudi, SpOG, MPH.M., MHKes;beserta jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 13.25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. RDP Komisi I DPR RI dengan Dirjen Kuathan Kemhan, Kapuskes Mabes TNI, Sekjen Kemenkes, Dirut PT ASABRI (Persero), dan Dirut BPJS Kesehatan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung, S.I.P., Wakil Ketua Komisi I DPR RI, serta dilanjutkan dan ditutup oleh Ir. H. Satya Widya Yudha, M.E., M.Sc., Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Puskes TNI, dan BPJS Kesehatan untuk berkoordinasi dalam rangka penyelesaian payung hukum terkait pelayanan kesehatan bagi Prajurit TNI, PNS Kemhan dan Keluarganya, serta Purnawirawan agar bisa memberikan pelayanan secara prima dengan mempertimbangkan kekhususan sejarah, organisasi, dan tugas Kemhan/TNI, meliputi:
  - a. Pelayanan fasilitas kesehatan Kemhan/TNI yang bersifat komando dan sentralistik.
  - b. Pelayanan kesehatan bagi Prajurit TNI, PNS Kemhan dan Keluarganya, serta Purnawirawan diberikan dan dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Kemhan/TNI.
  - c. Sistem rujukan dan pelayanan kesehatan harus diatur tersendiri sesuai dengan kepentingan Kemhan dan TNI karena kekhasan organisasi dan tugasnya.

2. Komisi I DPR RI melalui Pimpinan DPR RI segera meminta Presiden RI untuk segera melakukan rapat koordinasi terbatas dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Dirut PT. ASABRI, dan Dirut BPJS Kesehatan dalam rangka penyelesaian masalah pelayanan kesehatan bagi Prajurit TNI, PNS Kemhan dan Keluarganya serta Purnawirawan.
3. Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan sepakat untuk menunda rujukan *online* bagi Prajurit TNI, PNS Kemhan dan Keluarganya, serta Purnawirawan agar bisa berobat langsung ke fasilitas kesehatan Kemhan/TNI dan melaporkan kepada Komisi I DPR RI selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan November 2018.
4. Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Pertahanan/TNI, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan untuk membentuk gugus tugas (*task force*) dengan *leading sector* Kementerian Pertahanan dalam rangka menyiapkan kebijakan diskresi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Prajurit TNI, PNS Kemhan dan Keluarganya serta Purnawirawan dan melaporkan perkembangannya kepada Komisi I DPR RI dalam tenggat waktu 2 (dua) minggu.

### III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 16.25 WIB.

Jakarta, 16 Oktober 2018

**KETUA RAPAT,**

**Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.Sc**

**A-290**